LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP)

TAHUN 2025

Disusun oleh:

DINAS SOSIAL KOTA PASURUAN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat, rahmat dan hidayat-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025 ini dapat disusun.

LKjIP Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025 ini merupakan dokumen laporan evaluasi SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2025. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini akan diketahui sejauh mana tingkat keberhasilan atau kegagalan terhadap pelaksanaan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025 dan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dalam melihat capaian keberhasilan sekaligus kendala/permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Pasuruan

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota Pasuruan tahun 2025, semoga bermanfaat untuk pihak-pihak yang berkepentingan dan Allah SWT meridhoi segala upaya yang dilakukan segenap pelaku pembangunan di Dinas Sosial Kota Pasuruan untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, berwawasan kebangsaan dan religius.

Pasuruan, 26 Februari 2026
Dinas Sosial Kota Pasuruan

KOKOH ARIE HIDAYAT, SE, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19760919 199602 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Untuk mewujudkan good governance dan terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas KKN (korupsi, kolusi,nepotisme) diperlukan sistem akuntabilitas pada seluruh jajaran aparatur negara.

Dinas Sosial Kata Pasuruan sesuai Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial adalah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Kesejahteraan sosial.

Untuk dapat melihat tingkat keberhasilan Dinas Sosial Kata Pasuruan, maka perlu dibuat pengukuran kinerja melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025. Pengukuran kinerja diukur berdasarkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang tertera pada Rencana Strategis Dinas Sosial Kata Pasuruan Tahun 2021-2026

Tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kata Pasuruan dituangkan dalam 6 program, 15 kegiatan dan 41 sub kegiatan. Dari capaian terhadap tujuan dan sasaran tersebut, secara umum menunjukkan tingkat keberhasilan dengan rata-rata berhasil. Setelah dilakukan analisis maka didapatkan bahwa secara umum menunjukan suatu keberhasilan. Adapun Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Sosial yaitu persentase PPKS yang terakses layanan sosial dasar dengan target tahun 2025 sebesar 64 % dan realisasi mencapai 87,24%. Dapat disimpulkan dari capaian yang diperoleh telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Pencapaian tersebut telah sesuai dengan yang diharapkan dan direncanakan. Banyak faktor yang mempengaruhi / menghambat pencapaian sasaran tersebut antara lain :

1. Ketersediaan dana, sumber daya manusia yang terpenuhi kuantitas dan kualitasnya.
2. Pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan serta terfasilitasinya kegiatan yang berhubungan dengan PSKS dan proses koordinasi serta komunikasi yang baik antara PSKS dan Dinas Sosial.

Upaya yang dilakukan antara lain :

1. Berusaha lebih menjangkau PPKS yang membutuhkan layanan
2. Menjalin komunikasi dan hubungan kerjasama yang lebih baik dengan pilar-pilar Dinas Sosial

Untuk masa mendatang, hasil evaluasi dan analisis diatas akan dijadikan masukan agar pencapaian sasarannya tetap sesuai dengan yang diharapkan.

Beberapa prinsip penyusunan dan penyajian laporan telah disajikan dengan berbagai pertimbangan. Prinsip-prinsip pelaporan yang baik mungkin saja tidak semua dapat diterapkan pada Laporan Kinerja ini, namun demikian laporan ini masih memenuhi tujuan penyusunannya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
IKHTISAR EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi 1
1.2.1 Isu Strategi 1
1.2.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja 2
1.2.3 Dukungan SDM 3
1.2.4 Sarana dan Prasarana 4
1.2.5 Anggaran 7
1.3 Dasar Hukum 8
1.4 Sistematika Laporan Kinerja 9
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 9
1.6 Langkah Perbaikan Internal PD atas Rekomendasi LKJIP 2023 9
BAB II 10
PERENCANAAN KINERJA 10
2.1 Tujuan dan Sasaran dan Indikator kinerja lima tahun terakhir Perangkat Daerah 10
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025 17
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 17
2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja 25
BAB III 27
AKUNTABILITAS KINERJA 27
3.1 Capaian Kinerja 27
3.1.1 Skala Capaian Kinerja 27
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan 27
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 29
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan startegis organisasi 30
3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional 31
3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan 31
3.1.7 Analisis dan efisiensi penggunaan sumber daya 32
3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 33
3.2 Realisasi Anggaran 36
3.3 Inovasi 36

3.4 Penghargaan 37
BAB IV 38
Penutup 38
4.1 Kesimpulan 38
4.2 Rekomendasi 39
LAMPIRAN 40

DAFTAR TABEL

1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025 7
2.1.1 Tabel Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis Sebelum 13
2.1.1 Tabel Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis Sesudah 13
2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025 13
2.3 Rencana Kinerja Tahun 2025 Dinas Sosial Kota Pasuruan 17
2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025 17
2.5 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025 18
2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025 21
2.7 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Kota Pasuruan Perubahan tahun 2025 22
3.1 Pengkatagorian Capaian Kinerja 27
3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025 27
3.2.1 Tabel Pengukuran Kinerja Sasaran 28
3.3 Perbandingan Capaian Kinerja 30
3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis 30
3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/ Kota 31
3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi 31
3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran 32
3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan 33
3.9 Realisasi Anggaran 36

DAFTAR GAMBAR

1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pasuruan..... 3

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia pada prinsipnya adalah merupakan rangkaian upaya untuk merealisasikan amanat konstitusi. Yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan tersebut hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya. antara lain meliputi pembangunan fisik / radikal dan mental / batinia untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan, baik secara perorangan, keluarga maupun kelompok masyarakat secara bermartabat dengan menempatkan mereka sebagai pelaku pembangunan.

Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna. Oleh karena itu untuk mengetahui apakah pembangunan itu telah berjalan sesuai dengan yang diinginkan maka perlu kiranya di buatkan suatu laporan yang berisi tentang hasil kegiatan pembangunan dan evaluasinya agar dapat diketahui keberhasilannya ataupun kekurangannya. Dengan harapan kedepannya dapat dilakukan peningkatan-peningkatan dan perbaikan-perbaikan.

1.2. Penjelasan Umum Organisasi

1.2.1 Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Pasuruan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam peningkatan pelayanan yang optimal di bidang sosial, karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat Kota Pasuruan di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.
Isu-isu strategis yang berkaitan dengan Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

i. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
   a. Peningkatan Kapasitas PSKS
   b. Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial.
   c. Peningkatan Kesejahteraan Sosial masyarakat.
   d. Pembinaan Karang Taruna dan Karang Wherda.

ii. Bidang Rehabilitasi Sosial
   a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
   b. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penduduk Rentan dan Termarjinalkan (Kelompok usia produktif dengan resiko tertentu)

c. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
d. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Orang dengan Disabilitas (ODGJ)
e. Pendampingan Anak berhadapan dengan hukum

iii. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
a. Pengelolaan Data Kesejahteraan Sosial (DTSEN)
b. Pemberian bantuan bagi Masyarakat
c. Penanganan Sosial Korban Bencana
d. Koordinasi Taruna Siaga Bencana
e. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

1.2.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan No 11 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial adalah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam melaksanakan urusan kesejahteraan sosial. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Sosial Kota Pasuruan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
3. Pelaksanaan kebijakant eknis bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
4. Pelaksanaan Pelayanan bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
5. Pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaan urusan bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
6. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan perlindungan, jaminan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
7. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Sosial.

Berikut bagan struktur organisasi yang tertera pada Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Pasuruan:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pasuruan

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PERANGKAT DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA PASURUAN



1.2.3 Dukungan SDM

No	Uraian	Jumlah
1	Kepala Dinas Sosial	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Sub Bagian	1
4	Kepala Bidang	3
5	Pejabat Fungsional	3
6	Pegawain Staff ASN	34
7	Pekerja Harian Lepas	8
	Total	51

1.2.4 Sarana dan Prasarana

Dinas Sosial memiliki 5 bangunan meliputi :

Kantor Dinas Sosial

No	Uraian	Jumlah
1	Ruangan Kepala Dinas	1
2	Ruangan Sekretaris	1
3	Ruangan Kepegawaian	1
4	Ruangan Keuangan	1
5	Ruangan Bidang Pemberdayaan Sosial	1
6	Ruangan Bidang Rehabilitasi Sosial	1
7	Ruangan Perlindungan dan Jaminan Sosial	1
8	Ruangan Rapat	1
9	Ruangan Sekretariat PKH	1
10	Ruangan Sekretariat TKSK	1
11	Ruangan Sekretariat Tagana	1
12	Ruangan Arsip	1
13	Mushollah	1

Aset Ruangan Kepala Dinas Sosial

No	Uraian	Jumlah
1	meja	1
2	kursi	3
3	Set kursi	1
4	AC	1
5	Kulkas	1
6	TV	1
7	Laptop	1
8	Tablet	1

Aset Ruangan Sekretaris Dinas Sosial

No	Uraian	Jumlah
1	Meja	2
2	Kursi	4
3	Lemari Arsip	1
4	AC	1

Aset Ruangan Kepegawaian

No	Uraian	Jumlah
1	Personal Computer (PC)	1
2	Laptop	2

3	Printer	3
4	Meja	5
5	Kursi	7
6	AC	1
7	Felling Kabinet	1
8	Rak Buku	1
9	Mesin Scanner	1
10	Mesin Oenghancur Kertas	1
11	Lemari	2
12	Papan Tulis	1

Aset Ruangan Keuangan

No	Uraian	Jumlah
1	Personal Computer (PC)	2
2	Printer	3
3	Laptop	4
4	Meja	7
5	Kursi	11
6	AC	1
7	Set Felling Kabinet	1
8	Brankas	1
9	Lemari	1

Aset Ruangan Bidang Pemberdayaan Sosial

No	Uraian	Jumlah
1	Personal Computer (PC)	3
2	Printer	4
3	Laptop	3
4	Meja	8
5	Kursi	9
6	AC	1
7	Felling Kabinet	4

Aset Ruangan Rehabilitasi Sosial

No	Uraian	Jumlah
1	Personal Computer (PC)	5
2	Printer	5
3	Laptop	2
4	Meja	11
5	Kursi	12
6	AC	2
7	Felling Kabinet	3
8	Kulkas	1

9	Papan Tulis	1

Aset Ruangan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

No	Uraian	Jumlah
1	Personal Computer (PC)	4
2	Printer	3
3	Laptop	3
4	Meja	8
5	Kursi	8
6	AC	1
7	Lemari Arsip	1
8	Papan Tulis	1

Aset Ruangan Rapat

No	Uraian	Jumlah
1	Kursi Rapat	43
2	Kursi Narasumber	3
3	Meja Narasumber	1
4	Meja Panjang	2
5	TV	1
6	AC	2
7	Speaker	2
8	Mixer	1
9	CCTV	1

Aset Ruang Sekretariat PKH

No	Uraian	Jumlah
1	Meja	1
2	Kursi	1
3	Felling Kabinet	1

Aset Ruangan Sekretariat Tagana

No	Uraian	Jumlah
1	Meja	1
2	Kursi	1
3	Felling Kabinet	1

Aset Ruangan Anak Hebat

No	Uraian	Jumlah
1	Meja Resepsionis	1
2	Kursi Resepsionis	1

3	Set Kursi Tamu	1
4	Lemari	1
5	AC	4
6	Kipas Angin	1
7	Dipan	1
8	Meja Resepsionis	1
9	Meja Besar	2

Aset Ruangan Anak Hebat Disabilitas (REHAT)

No	Uraian	Jumlah
1	Kipas Angin	2
2	Set Kursi	2
3	Meja	2
4	Kursi	3
5	Lemari	1
6	Felling Kabinet	1
7	AC	1

Ruang Muda Tumbu Kreatif dan Shelter Penanganan Orang Terlantar

1	AC	1
2	Kasur	5

Aset Taman Makam Pahlawan

No	Uraian	Jumlah
1	Meja	1
2	Kursi	1
3	Papan Tulis	1

1.2.5 Anggaran

Besaran anggaran yang dimiliki Dinas Sosial sesuai dengan usulan masyarakat melalui musrenbang serta menyesuaikan kebutuhan dinas. Sumber anggaran berasal dari APBD yang ter tuang pada DPPA tahun 2025.

Tabel 1.1 Perbandingan Anggran Tahun 2024 dan Tahun 2025

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	2024	Rp. 23.947.995.924
APBD	2025	Rp. 14.963.359.087

Sumber : Dokumen DPPA tahun 2024 dan 2025

1.3. Dasar Hukum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial KotaPasuruanTahun 2022 disusun beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Intruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2030;
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Walikota Pasuruan No 50 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah;
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan fungsi Dinas Sosial.

1.4. Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

BAB I **Pendahuluan**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas pokok dan fungsi, Isu Strategis pada Dinas Sosial Kota Pasuruan, dan sistematika penyajiannya.

BAB II **Perencanaan Kinerja**

Memuat Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025.

BAB III **Akuntabilitas Kinerja**

3.1 Berisi penjelasan singkat tentang Capaian Target Sasaran Strategis tahun 2025, juga evaluasi dan analisis capaian kinerja tahun 2025 yang diuraikan per sasaran strategis dan akuntabilitas anggaran, dan membandingkannya dengan tahun sebelumnya.

3.2 Anggaran yang telah teralisasi diperuntukkan sesuai dengan perencaan yang telah disusun dan sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat.

BAB IV **Penutup**

Dinas Sosial telah melakukan kinerja semaksimal mungkin dalam masalah sosial, meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, Verifikasi dan Validasi data terkait penerima bantuan sosial.

LAMPIRAN
1. PK (Perjanjian Kinerja).
2. Lain-lain yang dianggap perlu.

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2025

1. Mengadakan rapat koordinasi perencanaan kinerja terkait dokumen crosscutting untuk memastikan keselarasan hubungan kinerja antar bidang.
2. Melakukan pendampingan Bersama Bagian Organisasi atau Bappelitbangda dalam pembuatan dokumen crosscutting.
3. Setiap 3 bulan akan dilakukan evaluasi internal, membuat notulensi dan meningkatkan capaian kinerja periode berikutnya.
4. Melakukan reviu secara berjenjang atas capaian selurug kriteria SAKIP Dinas Sosial.

1.6 Langkah Perbaikan Internal Perangkat Daerah atas rekomendasi LKJIP 2025

1. Melakukan koordinasi terkait pembuatan crosscutting dengan instansi-instansi terkait.
2. Melakukan evaluasi Dinas terhadap capaian dan realisasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja 5 Tahun Terakhir Perangkat Daerah

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pasuruan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabarandari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam halini Dinas Sosial Kota Pasuruan. Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pasuruan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pasuruan Nomor :188/79/423.105/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pasuruan PerubahanTahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Walikota terkait dengan penetapan//kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pasuruan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Sosial Kota Pasuruan tersebutditujukan untuk mewujudkanvisi dan misi Kepala Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2021-2026. Disamping itu pula, Renstra Dinas Sosial Kota Pasuruan diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Sosial RI, Bappenas dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagai suatu system perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Pasuruan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Pasuruan dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum PD, sehingga Renstra Dinas Sosial Kota Pasuruan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Sosial Kota Pasuruan dan stakeholders.

Selanjutnya Renstra Dinas Sosial Kota Pasuruan tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Pasuruan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Sosial Kota Pasuruan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Walikota dan Wakil Walikota beserta segenap aparatur sebagai pelaksana dan penyelenggara pembangunan di Kota Pasuruan. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Pasuruan dengan potensi,

keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi harus mampu di bangun menuju ***PASURUAN KOTA MADINAH " Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya "***

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Walikota Pasuruan Tahun 2021-2026 yang berkaitan dengan Dinas Sosial adalah Misi I dan Misi III, yaitu :

Misi I : *Mempercepat Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Untuk Membuka Lapangan Kerja dan Pengurangan Kemiskinan.*

Misi III: *Memantapkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis Dengan Modal Sosial Yang Tangguh, Pendidikan dan Kesehatan Berkualitas dan Penanganan Covid-19 yang Tangkas.*

Misi Dinas Sosial yang mendukung capaian Visi Walikota Pasuruan adalah sebagai berikut:

a. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat penyandang masalah sosial;
b. Terwujudnya peningkatan dan perluasan pembangunan kesejahteraans osial oleh pemerintah dan masyarakat.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang hendak dicapaidari Visi dan Misi diatas adalah :

- Meningkatnya kemandirian pemerlu pelayanan sosialdasar (PPKS)

Sasaran adalah penjabarandari tujuan, yaitu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasisosial. Idealnya sasaran dapat dijabarkan secara kuantitatif sehingga dapat diukur pencapaiannya. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara focus, efektif dan efisien.

Sasaran Dinas Sosial Kota Pasuruan selama 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya layanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS);

Tujuan dan Sasaran pada Dinas Sosial diatas sudah mengalami perubahan yang didasarkan oleh rekomendasi nara sumber Kemenpan RB, Tim SAKIP Kota dan Bapelitbangda Kota Pasuruan.

Tujuan, sasaran dan indikator kinerja dan Target Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1.1 Tabel Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnyakemandiriannpemerlu pelayanan sosialdasar (PPKS)	MeningkatnyaLayananPemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang terakses layanan sosial dasar	90%	92%	95%	97%	99%

Sumber : RENSTRA Dinas Sosial Kota Pasuruan Periode 2021 – 2026

Pada tahun 2025 terdapat penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pasuruan. Penyesuaian tersebut dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan strategis lima tahunan, sehingga dilakukan penyelarasan kembali atas kebijakan dan prioritas pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan penyesuaian RPJMD dimaksud, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah juga dilakukan penyesuaian guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara tujuan, sasaran, program, dan indikator kinerja Perangkat Daerah dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Penyesuaian ini dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan yang normatif dan terstruktur sesuai dengan siklus perencanaan dan penganggaran.

Menindaklanjuti penyesuaian dokumen perencanaan daerah dimaksud, Dinas Sosial Kota Pasuruan melakukan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan mengacu pada Pohon Kinerja Kota Pasuruan terbaru. Penyesuaian tersebut berdampak pada perubahan perumusan indikator kinerja tujuan dan sasaran, sebagai bentuk penyelarasan antara mandat Perangkat Daerah dengan sasaran strategis pembangunan daerah.

Sebagai implikasi dari penyesuaian tersebut, Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Pasuruan mengalami perubahan, khususnya pada indikator kinerja tujuan, sedangkan indikator kinerja sasaran tetap dipertahankan dan tidak mengalami perubahan. Kondisi ini menyebabkan keterbandingan indikator kinerja tujuan antar periode RPJMD menjadi terbatas, namun dengan tetap terjaganya konsistensi indikator kinerja sasaran, kesinambungan pengukuran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tetap dapat dilakukan secara objektif dan akuntabel. Tujuan, sasaran, serta indikator kinerja Dinas Sosial Kota Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Bab IV Dokumen Renstra 2025-2029, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1.2 Tabel Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis 2025 - 2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Kemandirian PPKS	Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang terakses Layanan Sosial Dasar	64%	65,9%	67,9%	72%	74.19%

Sumber : RENSTRA Dinas Sosial Kota Pasuruan Periode 2025 – 2029

Dinas Sosial Kota Pasuruan dalam merencanakan program, kegiatan, dan indikator kinerja mengacu pada Indikator Kinerja Utama dalam Renstra Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Pasuruan yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari target kinerja RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025-2029.

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formula		
				Definisi Operasional	Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Kemandirian PPKS	%Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	PPKS yang Mandiri	Jumlah PPKS yang tergraduasi ----------x 100% Jumlah PPKS	Bidang Pemberdayaan Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025

Berikut adalah Formula IKU Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025:

Tabel 2.2.

Tabel Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi	METODE / FORMULASI PERHITUNGAN	Target						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Meningkatkan Kemandirian PPKS	%PPKS Yang Mandiri	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Definisi Operasional PPKS Mandiri Yang Tergraduasi terdiri dari Jumlah Fakir Miskin,	$\frac{Jumlah\ PPKS\ Yang\ Ter}{Jumlah\ PPKS}$	15	15.45	15.9	16.4	16.9	17.4	Dinas Sosial Kota Pasuruan	Kepala Dinas Sosial Kota Pasuruan

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi	METODE / FORMULASI PERHITUNGAN	Target						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Penyandang Disabilitas dan WRSE yang tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan dan/atau meningkatnya suatu kondisi sosial ekonomi, yang dibuktikan melalui kegiatan pemutakhiran data.									
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	%PPKS Yang Terakses Layanan Sosial Dasar	Penanganan kesejahteraan sosial dilakukan secara terpadu baik pada tingkat pusat maupun daerah terhadap 26 (dua puluh enam) jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebagai berikut : 1. Anak Balita Terlantar 2. Anak Terlantar 3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum 4. Anak Jalanan 5. Anak dengan Kedisabilitasan 6. Anak Korban	$\frac{Jumlah\ PPKS\ Terakses\ Layanan\ Sosial\ Dasar}{Jumlah\ PPKS}$	64	65.9	67.9	69.9	72	74.19	Dinas Sosial Kota Pasuruan	Kepala Dinas Sosial Kota Pasuruan

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi	METODE / FORMULASI PERHITUNGAN	Target						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Tindak Kekerasan 7. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 8. Lanjut Usia Terlantar 9. Penyandang Disabilitas 10.Tuna Susila 11.Gelandangan 12.Pengemis 13.Pemulung 14.Kelompok Minoritas 15.Bekas warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan 16.Orang dengan HIV/AIDS 17.Korban Penyalahgunaan Napza 18.Korban Trafficking 19.Korban Tindak Kekerasan 20.Pekerja Migran Bermasalah Sosial 21.Korban Bencana Alam 22.Korban Bencana Sosial 23.Perempuan Rawan Sosial 24.Fakir Miskin 25.Komunitas Adat Terpencil									

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi	METODE / FORMULASI PERHITUNGAN	Target						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		26.Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis									

2.2. Rencana Kinerja tahun 2025

Tujuan dan Sasaran beserta indikator selaras denga Renja PD yang dituangkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahun 2025 Dinas Sosial Kota Pasuruan

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kemandirian pemerlu pelayanan sosial dasar (PPKS)	1.1	Meningkatnya Layanan emerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang terakses layanan sosial dasar	%	64

Sumber :Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen perjanjian kinerja tahun 20245menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2025

Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Target kinerja pada tingkat Sasaran Strategis akan menjadi tolak ukur tabel dibawah ini :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%PPKS yang terakses layanan sosial dasar	64 %

Sumber :Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025

PROGRAM	ANGGARAN	
1. Program Pemberdayaan Sosial	Rp.	6.519.556.600,00
2. Pogram Rehabilitasi Sosial	Rp.	1.498.936.640,00
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp.	5.748.284.483,00
4. Penanganan Bencana	Rp.	301.479.800,00
5. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Rp.	88.976.300,00
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	4.854.516.262,00

Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan berdasarkan DPA 2025 Dinas Sosial dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.5. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegatan	Target Capaian Kinerja
1	2	3
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar		
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial		
DINAS TENAGA KERJA		
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Bantuan Sosial yang tersalurkan	100%
	Persentase PSKS yang Aktif	89%
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang meningkat kapasitasnya	89%
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	108 Orang
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Keluarga Yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1.226 Orang
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Lembaga

	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang direhabilitasi sesuai tahun dasar	9,2%
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, LanjutUsia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	9,2%
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang MendapatkanAkses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di LuarPantiSosialP	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	9,2%
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	38 Orang
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan Alat Bantu, dan Alat Bantu Peraga sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Item
	Pemberian BimbinganFisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1.657 Orang
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Anak
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase DTSEN yang di update	1,4%
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Persentase DTSEN yang di update	1,4%
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kabupaten/Kota	45.495 Keluarga
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	692 Keluarga
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenganan Kabupaten/Kota	1.467 Orang
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang tertangani	100 %
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan dasar	100 %

	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	12.000 Orang
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Unit
	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota	Persentase Taruna Siaga Bencana yang aktif	100%
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	48 Orang
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase cakupan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	2 %
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Luasan Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	100%
		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaanya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	257 Makam

Sumber :Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Tahun 2025

Kegiatan / Sub Kegiatan				Anggaran	
1		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Rp.	6.519.556.600
	1.1	Peningkatan Kemampuan Potensi PekerjaSosial Masyarakat Kewenangan Kab/Kota		Rp.	654.084.900
	1.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota		Rp.	33.520.300
	1.3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kab/Kota		Rp.	4.315.064.600
	1.4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota		Rp.	1.516.886.800
2		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, LanjutUsia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di LuarPantiSosial		Rp.	256.261.800
	2.1	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Rp.	206.442.300

	2.2	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Rp.	49.819.500
3		Rehabilitasi SOsial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di LuarPanti Sosial		Rp.	1.242.674.840
	3.1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Rp.	20.938.400
	3.2	Penyediaan Alat Bantu		Rp.	218.808.300
	3.3	Pemberian BimbinganFisik, Mental, Spiritual dan Sosial		Rp.	909.233.340
	3.4	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Rp.	93.694.800
4		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota		Rp.	5.748.284.483
	4.1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota		Rp.	208.016.100
	4.2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Rp.	1.493.130.200
	4.3	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Rp.	4.047.138.183
5		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota		Rp.	98.764.300
	5.1	Penyediaan Makanan		Rp.	60.764.300
	5.2	Penyediaan Sandang		Rp.	6.411.900
	5.3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		Rp.	3.852.600
	5.4	Penanganan Khusus Bagi KelompokRentan		Rp.	3.000.000
	5.5	Pelayanan Dukungan Psikososial		Rp.	24.110.000
6		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota		Rp.	203.341.000
	6.1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Rp.	203.341.000
7		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Rp.	88.976.300

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Pasuruan Awal dan Setelah PAK Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	
			Sebelum	Setelah
1	Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%PPKS yang terakses layanan sosial dasar	97 %	64 %

Sumber :Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025

PROGRAM		ANGGARAN		
		Sebelum	Sesudah	
1.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 6.519.556.600,00	Rp.	5.514.554.900,00
2.	Pogram Rehabilitasi Sosial	Rp. 1.498.936.640,00	Rp.	1.421.229.460,00

3.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 5.748.284.483,00	Rp. 2.730.774.683,00
4.	Penanganan Bencana	Rp. 301.479.800,00	Rp. 186.635.800,00
5.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Rp. 88.976.300,00	Rp. 31.837.100,00
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.854.516.262,00	Rp. 5.078.327.144,00

Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan berdasarkan DPA 2025 dan DPPA 2025 Dinas Sosial dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.7. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Kota Pasuruan Perubahan Tahun 2025

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegatan	Target Capaian Kinerja	
1	2	3	4
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar			
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial			
DINAS TENAGA KERJA			
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Bantuan Sosial yang tersalurkan	100%	100%
	Persentase PSKS yang Aktif	87%	87%
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang meningkat kapasitasnya	100%	100%
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	108 Orang	108 Orang
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	4 Orang
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Keluarga Yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1.226 Orang	1.226 Orang
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Lembaga	6 Lembaga

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang direhabilitasi sesuai tahun dasar	9,2%	9,2%
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, LanjutUsia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	9.2 %	9.2 %
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang MendapatkanAkses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di LuarPantiSosialP	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	9,2 %%	9,2 %%
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	38 Orang	38 Orang
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan Alat Bantu, dan Alat Bantu Peraga sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Item	25 Item
Pemberian BimbinganFisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1.657 Orang	1.657 Orang
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Anak	25 Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase DTSEN yang di update	1,4%	1,4%
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Persentase DTSEN yang di update	1,4%	1,4%
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kabupaten/Kota	45.495 Keluarga	45.495 Keluarga
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	692 Keluarga	692 Keluarga
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenganan Kabupaten/Kota	1.467 Orang	408 Orang
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang tertangani	100 %	100 %

	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan dasar	100 %	100 %
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	12.000 Orang	12.000 Orang
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Unit	4 Unit
	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25 Orang
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota	Persentase Taruna Siaga Bencana yang aktif	100%	100%
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	48 Orang	48 Orang
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase cakupan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100%	100%
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Luasan Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	100%	100%
		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaanya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	257 Makam	257 Makam

Sumber :Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Tahun 2025

Kegiatan / Sub Kegiatan				Anggaran
1		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Rp. 5.514.554.900
	1.1	Peningkatan Kemampuan Potensi PekerjaSosial Masyarakat Kewenangan Kab/Kota		Rp. 578.059.000
	1.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota		Rp. 32.920.300

	1.3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kab/Kota		Rp.	3.370.393.900
	1.4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota		Rp.	1.553.181.700
2		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, LanjutUsia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di LuarPantiSosial		Rp.	1.421.229.460
	2.1	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Rp.	151.139.100
	2.2	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Rp.	17.472.900
3		Rehabilitasi SOsial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di LuarPanti Sosial		Rp.	1.252.090.360
	3.1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Rp.	30.973.000
	3.2	Penyediaan Alat Bantu		Rp.	47.802.200
	3.3	Pemberian BimbinganFisik, Mental, Spiritual dan Sosial		Rp.	1.134.453.400
	3.4	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Rp.	118.828.700
4		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota		Rp.	6.684.867.513
	4.1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota		Rp.	294.517.600
	4.2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Rp.	1.701.486.800
	4.3	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Rp.	4.688.863.113
5		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota		Rp.	98.733.400
	5.1	Penyediaan Makanan		Rp.	55.242.000
	5.2	Penyediaan Sandang		Rp.	5.935.800
	5.3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		Rp.	3.520.600
	5.4	Penanganan Khusus Bagi KelompokRentan		Rp.	3.000.000
	5.5	Pelayanan Dukungan Psikososial		Rp.	31.035.000
6		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota		Rp.	297.507.100
	6.1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Rp.	297.507.100
7		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Rp.	101.140.400

2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Layanan Sosial Terintegerasi (LASTRI)

Layanan Sosial Terintegrasi merupakan aplikasi yang dibuat untuk menunjang kinerja pengolahan data masyarakat miskin melalui proses verifikasi dan validasi data, Sarana yang digunakan masyarakat untuk pengusulan pelayanan kesejahteraan sosial baik itu d Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial,Program Perlindungan Jaminan Sosial. Melalui verifikasi dan

Validasi data masyarkat miskin mendapatkan bantuan akan menjamin ketepatan penerima bantuan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, disamping itu Layanan Sosial Terintegrasi juga merupakan transparasi data khususnya kelompok-kelompok masyarakat yang mengakses layanan kesejahteraan sosial yang ada pada Dinas Sosial Kota Pasuruan.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akutabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori / Interprestasi	Rata – Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber :Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Tahun Pelaporan

Kinerja Dinas Sosial Kota Pasuruan diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program / kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program / Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran. Pencapaian IKU Dinas Sosial Kota Pasuruan secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

Tabel 3.2Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Katagori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%PPKS yang terakses layanan sosial dasar	64	87,24	136,31		Bidang Pemberdayaan Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Sumber :LKPJ Tahun 2025

Dari tabel tersebut diatas, faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap keberhasilan capaian kinerja serta rencana aksi akan dijelaskan pada masing masing IKU pada halaman berikutnya.

Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja sasaran strategis. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran dengan target 64 % dengan realisasi 87,24 % dengan capaian 136,31 %. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Sedangkan Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja juga dilakukan analisis kinerja dengan cara membandingkan antara outputs dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi antara nilai input dengan output.

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah dikemukakan diatas, penjelasan tentang analisis capaian kinerja pada Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan "Meningkatkan Kemandirian PPKS"

1.1. Sasaran 1 : Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Tabel 3.2.1
Tabel Pengukuran Kinerja Sasaran 1

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Persentase PPKS yang terakses Layanan Sosial Dasar	64%	87,24 %	136,31 %

Tabel diatas menunjukan capaian kinerja sasaran sebesar 100,01%. (dalam katagori AA / Sangat Memuaskan)

Faktor pendukung dari pencapaian ini karena didukung oleh jalannya koordinasi dan konsultasi antara pilar-pilar sosial dengan Dinas Sosial Kota Pasuruan.

Mengacu pada tingkat keberhasilan capaian kinerja beserta faktor pendukung dan penghambatnya, Dinas Sosial akan menyusun rencana aksi untuk tahun anggaran 2025 yaitu :

1. Memperbaiki Program Perlindungan Sosial Dengan Perubahan Strategi Penyaluran Bantuan Sosial Terpadu Berbasis
2. Melakukan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dengan Peningkatan Kapasitan KUBE Di Setiap Kelurahan

3. Melanjutkan Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data KPM Pemenerima Bantuan Sosial Untuk Menjamin Ketepatan Sasaran
4. Pemberian Bantuan sosial kepada anak yatim, lansia potensial, penyandang cacat, dhuafa, WRSE, Lansia terlantar dan pemberian Alat Bantu
5. Melaksanakan penyaluran hewan kurban sesuai dengan jadwal penyaluran
6. Melaksanakan verifikasi dan validasi data PBI untuk mendapatkan data yg akurat
7. Melaksanakan verifikasi dan validasi data DTSEN sebagai upaya mendapatkan data akurat dan ter update

Untuk mendukung keberhasilan kinerja sasaran ini, Dinas Sosial melaksanakan program dan beberapa kegiatan. Diantaranya adalah :

1. Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, LanjutUsia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di LuarPanti Sosial
2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
3. Program PemberdayaanSosial, Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteran Sosial Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Penanganan Bencana, Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial dan Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota
5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.

Tingkat keberhasilan yang dicapai antara lain meliputi peran serta stake holder, pilar-pilar sosial, dan perangkat daerah. Hambatan yang ditemui dalam pencapaian sasaran ini adalah belum ada tenaga operator data khusus PMKS, mengingat data PMKS setiap bulannya senantiasa mengalami perubahan seiring kondisi pada sasaran kegiatan.

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kota PasuruanTahun 2025 dengan tahun sebelumnya dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi masing – masing indikator kinerja sasaran.

Rincian tingkat capaian kinerja masing – masing indikator kegiatan tersebut dapat diilustrasikan dalam bentuk tabel di bawah :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang terakses layanan sosial dasar	92 %	97,85 %	64 %	87,24 %	136,31 %

Sumber :LkjIP 2023, 2024

Rata-rata perbandingan realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya sampai dengan realisasi tahun berjalan untuk Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terlayani adalah 87,24% data perbandingan tersebut mencerminkan bahwa untuk tingkat kemajuan Tahun 2025 adalah Baik

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisas kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Sosial Kota Pasuruan periode 2021 – 2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya layanan pemerlu pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang terakses layanan sosial dasar	87,24 %	74.19%	

3.1.5 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional / Provinsi / Kabupaten / Kota

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional/Provinsi/Nama Daerah Lain	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya layanan pemerlu pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS)	%PPKS yang terakses layanan sosial dasar	87,24 %	-	-

Sumber :Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pasuruan Th 2024

Belum ada yang melaporkan/mengupload hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari Provins, Kabupaten atau Kota Lainnya sehingga tidak dapat mencantumkan perbandingan capaian.

3.1.6 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	AnalisisKeberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya layanan pemerlu pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS)	% PPKS yang terakses layanan sosial dasar	64 %	87,24 %	136,31 %	Ketercapaian ini didukung oleh jalannya koordinasi dan konsultasi antara pilar-pilar sosial dengan Dinas Sosial Kota Pasuruan Serta ketersediaan dana maupun sumberdaya manusia yang terpenuhi kuantitas dan kualitasnya.	

Sumber : Monev 2025

3.1.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumberdaya disajikan pada table berikut :

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan AnggaranTujuan dan Sasaran :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya layanan pemerlu pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS)	64 %	87,24 %	136,31 %	14.963.359.087,00	12.685.796.093,77	84,78	60,8

Sumber : LKPJ 2025

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai efisiensi dari sasaran meningkatnya layanan PPKS sebesar 60,8%

3.1.8 Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerjadi serta uraian penjelasan tabel di bawah ini :

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kemandirian PPKS	%PPKS Yang Mandiri	15 %			265,3 %	Menunjang	
2	Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS Yang Terakses Layanan Sosial Dasar	64 %			146,31 %	Menunjang	
3				**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PSKS yang aktif**	100%	Menunjang	
4				***Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota***	***Persentase Bantuan Sosial yang tersalurkan***	56,85 %		

5				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang direhabilitasi sesuai tahun dasar	173,59 %	Menunjang	
6				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, LanjutUsia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	254,46 %	Menunjang	
7				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	166.30 %	Menunjang	
8				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase DTSEN yang di update	747,86 %	Menunjang	
9				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Persentase DTSEN yang di update	747,86 %	Menunjang	
10				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban bencana yang tertangani	100 %	Menunjang	
11				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota	Persentase Korban yang tertangani	100 %	Menunjang	

12				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi anggotaTaruna Siaga Bencana kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	100 %	Menunjang	
13				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase cakupan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	110%	Menunjang	
14				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100%	Menunjang	

Sumber : Monev 2025

Dari tabel diatas hamper seluruh program dan kegitan menunjang dan terlaksana sesuai dan melampaui target.

3.2. Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.9 Anggaran Program dan Kegiatan Capaian

Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Rp14.963.359.087,00	Rp12.015.796.093,77	80,30%
Program Pemberdayaan Sosial	Rp 5.514.554.900,00	Rp 4.493.075.237,00	81,48%
Program Rehabilitasi Sosial	Rp 1.421.229.460	Rp 829.631.544	58,37%
Program Perlindungan dan Jaminan Sosialis	Rp 2.730.774.683	Rp 1.877.254.534	68,74%
Program Penanganan Bencana	Rp 186.635.800	Rp 142.243.691	76,21%
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp 31.837.100	Rp 30.302.360	95,18%

Sumber : Monev 2025

Realisasi anggaran dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan sesua ketentuan, Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim Dinas Sosial dan dilakukan pengecekan data melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sehingga serapan yang telah dilakukan Dinas Sosial sejumlah RP. 12.015.796.093,77 atau dengan capaian 80,30 %.

3.3 Inovasi

- Rumah Hebat Disabilitas (REHAT)
- Café Disabilitas
- Ruang Harapan Anak Hebat
- Ruang Muda Tumbuh Kratif
- Shelter Penanganan Orang Terlantar (SPOT)

3.4 Penghargaan

- Penghargaan Pilar-pilar sosial berprestasi Tingkat Provinsi Juara 1 (Karang Werdha)
- Penghargaan Pilar-pilar sosial berprestasi Tingkat Provinsi Juara 1 (Pekerja Sosial Masyrakat)
- Penghargaan Pilar-pilar sosial berprestasi Tingkat Provinsi Juara 1 (Karang Taruna)

BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota Pasuruan ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik (AKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraanp emerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Sosial Kota Pasuruan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada Tahun 2025 Dinas Sosial Kota Pasuruan menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator sasaran. Secara rinci pencapaian kinerja Dinas Sosial Kota Pasuruan dapat ditunjukkan pada table dibawah ini :

No	Sasaran strategis	Jumlah indikator sasaran	Rata-rata capaian kinerja sasaran	Tingkat Pencapaian							
				Sangat berhasil		Berhasil		Cukup		Kurang	
				Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
MISI I dan III											
1	Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1 (satu) Sasaran : % PPKS yang terakses layanan sosialdasar	136,31	-	-	136,31	-	-	-	-	-

Dari tabel diatas bisadilihatbahwaada0 (Nihil) Indikatorsasaran yang masuk kategori " Sangat Berhasil ", 1 (satu) indikatorSasaran masuk kategori" **Berhasil** ",0 (Nihil) IndikatorSasaran masuk kategori" Cukup " dan 0 (Nihil)IndikatorSasaran masuk kategori ' Kurang ".

4.2 REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka ada beberapa rekomendasi, yakni sebagai berikut :

1 Pelaksanaan kegiatan serta anggaran dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.
2 Penambahan anggaran untuk biaya sarana.

Berdasarkan penjelasan dari berbagai bab, maka Dinas Sosial Kota Pasuruan telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi Walikota Pasuruan dengan didasari oleh ketentuan peraturan yang berlaku. Namun demikian masih diperlukan hanya berbagai penyempurnaan serta peningkatan guna mengoptimalkan kinerja Dinas Sosial Kota Pasuruan.

Demikian yang dapat kami laporkan, untuk dapat dijadikan bahan kebijakan lebih lanjut.

Pasuruan, 26 Februari 2026

Mengetahui/ Menyetujui
Dinas Sosial Kota pasuruan



KOKOH ARIE HIDAYAT, SE, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19760919 199602 1 003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
ESELON II
DINAS SOSIAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KOKOH ARIE HIDAYAT, SE, S.SOS, MM
Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : ADI WIBOWO
Jabatan : WALI KOTA
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
WALI KOTA

ADI WIBOWO

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS SOSIAL

KOKOH ARIE HIDAYAT, SE, S.SOS, MM
NIP. 197609191996021003

PERJANJIAN KINERJA

ESELON II

NAMA	:	KOKOH ASIH HIDAYAT, SE., S.SOS, MM
NIP	:	197609191996032003
PANGKAT / GOL.	:	PEMBINA UTAMA MUDA / IV/C
JABATAN / KELAS JABATAN	:	KEPALA DINAS SOSIAL / 14
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS SOSIAL
TAHUN	:	2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang terakses layanan sosial dasar	97%

NO	PROGAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp6.319.356.600	APBD
2.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp1.408.636.640	APBD
3.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp3.746.284.485	APBD
4.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp301.479.800	APBD
5.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN KABUPATEN KOTA	Rp88.976.300	APBD
6.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Rp4.834.516.262	APBD
JUMLAH		**Rp19.011.750.085**	**APBD**

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
WALI KOTA

NIP. [illegible]

Pekanbaru, 02 Januari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL

[illegible]
NIP. [illegible]

PERJANJIAN KINERJA

ESELON II

NAMA	:	KOKOH ARIF HIDAYAT, SE, S.SOS, MM
NIP	:	197809191996021003
PANGKAT / GOL.	:	PEMBINA UTAMA MUDA / IV/C
JABATAN / KELAS JABATAN	:	KEPALA DINAS SOSIAL / 14
PEJABAT DAERAH	:	DINAS SOSIAL
TAHUN	:	2025

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | OUTPUT / OUTCOME | | |

NO	PROGAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp6.519.556.600	APBD
2.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp1.498.936.640	APBD
3.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp5.748.284.483	APBD
4.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp301.479.800	APBD
5.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN KABUPATEN KOTA	Rp88.976.300	APBD
6.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Rp4.854.516.262	APBD
	JUMLAH	**Rp19.011.750.085**	**APBD**

Pasuruan, 02 Januari 2025

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
WALI KOTA

ADI WIDOWO

KEPALA DINAS SOSIAL

KOKOH ARIE HIDAYAT, SE., S.SOS, MM
NIP. 197609191996021003

DINAS SOSIAL

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA DINAS SOSIAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KOKOH ARIE HIDAYAT, SE, S.SOS, MM
Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : ADI WIBOWO
Jabatan : WALI KOTA
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 18 September 2025

Pihak Kedua, WALI KOTA	Pihak Pertama, KEPALA DINAS SOSIAL
ADI WIBOWO	KOKOH ARIE HIDAYAT, SE, S.SOS, MM NIP. 197609191996021003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

ESELON II

NAMA	:	KOKOH ARIE HIDAYAT, SE, S.SOS, MM
NIP	:	197609191996021003
PANGKAT / GOL.	:	PEMBINA UTAMA MUDA / IV-C
JABATAN / KELAS JABATAN	:	KEPALA DINAS SOSIAL / 15
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS SOSIAL
TAHUN	:	2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang terakses layanan sosial dasar	Persentase PPKS yang terakses layanan sosial dasar	64%	64%

NO	PROGAM	ANGGARAN		KETERANGAN
		Sebelum	Sesudah	
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp6.519.556.600	Rp 5.514.554.900	APBD
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp1.498.936.640	Rp 1.421.229.460	APBD
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp5.748.284.483	Rp 2.730.774.683	APBD
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp301.479.900	Rp 186.635.800	APBD
5	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN KABUPATEN KOTA	Rp98.976.300	Rp 31.837.100	APBD
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Rp4.854.516.362	Rp 5.078.327.144	APBD
JUMLAH		**Rp19.011.750.085**	**Rp 14.963.359.087**	**APBD**

Pasuruan, 18 September 2023

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
WALI KOTA

ADI WIDODO

KEPALA DINAS SOSIAL

KOKOH ARIK HIDAYAT, SE., S.SOS, MM
NIP. 197609191998021003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

ESELON II

NAMA	:	KOKOH ARIE HIDAYAT, SE, S.SOS, MM
NIP	:	197609191996021003
PANGKAT / GOL.	:	PEMBINA UTAMA MUDA / IV-C
JABATAN / KELAS JABATAN	:	KEPALA DINAS SOSIAL / 15
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS SOSIAL
TAHUN	:	2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	OUTPUT / OUTCOME																												%
				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		JML						
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi					
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang menerima layanan sosial dasar	Persen									5																5					
CAPAIAN OUTPUT												5																5					
% CAPAIAN KINERJA TIAP BULAN																																	

NO	PROGAM	ANGGARAN		KETERANGAN
		Sebelum	Sesudah	
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp6.519.556.600	Rp 5.514.554.900	APBD
2.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp1.498.936.640	Rp 1.421.229.460	APBD
3.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp5.748.284.483	Rp 2.730.774.683	APBD
4.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp301.479.800	Rp 186.635.800	APBD
5.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN KABUPATEN KOTA	Rp88.976.300	Rp 31.837.100	APBD
6.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Rp4.854.516.262	Rp 5.078.327.144	APBD
JUMLAH		**Rp19.011.750.085**	**Rp 14.963.359.087**	**APBD**

Pasuruan, 18 September 2025

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
WALI KOTA

ADI WISOKO

KEPALA DINAS SOSIAL



KUSUH ARIF HIDAYAT, SE, S.SOS, MM
NIP. 197609191996021003